

LAPORAN KEUANGAN

Periode yang berakhir
31 Desember 2017

Audited



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat 10110

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Litbang Perhubungan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Litbang Perhubungan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Litbang Perhubungan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2018
Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc
NIP. 19610323 198811 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
VI. Lampiran dan Daftar	59

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 Badan Litbang Perhubungan yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA dilingkungan Badan Litbang Perhubungan. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2018

Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc
NIP. 19610323 198811 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.138.844.919,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 97.137.904.761,- atau mencapai 83,60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 116.194.498.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 477.170.688.129,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 34.459.540,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 20.543.714.401,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 456.592.514.188,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 62.331.737,- dan Rp. 477.108.356.392,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 55.666.211,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 105.909.313.606,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (105.853.647.395),-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.1.079.613.413,- dan Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (104.774.033.982),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 468.673.193.282,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp. (104.774.033.982),- kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 17.210.137.250,- dan transaksi antarentitas senilai Rp. 95.999.059.842,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 477.108.356.392,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1,138,844,919	0.00	650,666,018
JUMLAH PENDAPATAN		-	1,138,844,919	0.00	650,666,018
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	40,005,800,000	26,329,963,097	65.82	29,884,925,571
Belanja Barang	B.4	73,966,228,000	68,649,633,109	92.81	122,616,074,138
Belanja Modal	B.5	2,222,470,000	2,158,308,555	97.11	4,171,937,468
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		116,194,498,000	97,137,904,761	83.60	156,672,937,177

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Beban Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	34.459.540	2.346.984.560
Persediaan Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		34.459.540	2.346.984.560
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Tanah Belum Diregister		-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	49.493.936.006	55.191.502.116
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	519.230.700	519.230.700
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.425.482.147	3.336.382.147
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(32.894.934.452)	(33.154.465.558)
Jumlah Aset Tetap		20.543.714.401	25.892.649.405
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	145.793.747.585	138.410.354.815
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		-	-
Aset Lain-Lain	C.22	323.895.312.333	306.301.793.188
Aset Lainnya Belum Diregister		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(13.096.545.730)	(4.278.588.686)
Jumlah Aset Lainnya		456.592.514.188	440.433.559.317
JUMLAH ASET		477.170.688.129	468.673.193.282
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	62.331.737	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		62.331.737	-
JUMLAH KEWAJIBAN		62.331.737	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	477.108.356.392	468.673.193.282
JUMLAH EKUITAS		477.108.356.392	468.673.193.282
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		477.170.688.129	468.673.193.282

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	55,666,211	6,106,173
JUMLAH PENDAPATAN		55,666,211	6,106,173
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	26,392,294,834	29,875,796,890
Beban Persediaan	D.3	2,622,839,840	1,404,391,357
Beban Barang dan Jasa	D.4	31,114,564,314	77,953,065,958
Beban Pemeliharaan	D.5	1,854,166,870	2,120,009,782
Beban Perjalanan Dinas	D.6	33,059,597,460	38,676,038,764
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	2,307,424,350	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	8,558,425,938	9,561,378,360
JUMLAH BEBAN		105,909,313,606	159,590,681,111
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(105,853,647,395)	(159,584,574,938)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
D.11			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		127,300,000	283,368,932
Pendapatan pelepasan aset Non Lancar		127,300,000	283,368,932
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		952,313,413	359,336,346
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		962,897,733	368,101,643
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		10,584,320	8,765,297
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1,079,613,413	642,705,278
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(104,774,033,982)	(158,941,869,660)
POS LUAR BIASA			
D.12			
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(104,774,033,982)	(158,941,869,660)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	468,673,193,282	474,114,339,665
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(104,774,033,982)	(158,941,869,660)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	17,210,137,250	(2,521,547,882)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	17,210,137,250	(2,521,547,882)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		17,210,137,250	(2,521,547,882)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	95,999,059,842	156,022,271,159
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		8,461,845,847	(5,441,146,383)
EKUITAS AKHIR	E.5	477,108,356,392	468,673,193,282

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Litbang Perhubungan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Badan Litbang Perhubungan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung terwujudnya transportasi yang handal melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat, Jakarta.

Badan Litbang Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan penelitian, pengembangan dan teknologi transportasi, dan melakukan kerjasama dengan lembaga iptek. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas penelitian, pengembangan dan teknologi menjadi landasan perumusan kebijakan strategis transportasi.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Badan Litbang Perhubungan berkomitmen dengan visi ***“Memberi Landasan dan Dukungan Melalui Kegiatan Penelitian Guna Terwujudnya Keselamatan Dan Keamanan, Pelayanan Transportasi Dan KapasitasTransportasi Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah.”***. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Melakukan pelayanan penelitian, pengembangan dan teknologi transportasi.
- Melakukan kerjasama dengan lembaga iptek.
- Melakukan penelitian, pengembangan dan teknologi untuk perumusan kebijakan strategis transportasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2017 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Litbang Perhubungan yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Litbang Perhubungan adalah 5 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAKPA

No	Kode Satker	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	288752	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	1				1
2	414267	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	1				1
3	288944	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1				1
4	288951	Puslitbang Transportasi Udara	1				1
5	634171	Puslitbang Transportasi Antarmoda	1				1
Jumlah			5				5

A.3. Basis Akuntansi

Badan Litbang Perhubungan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Litbang Perhubungan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Deputi Administrasi BAPK. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Litbang Perhubungan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu

adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

AsetLainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Litbang Perhubungan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2017		
	PAGU AWAL	PAGU REVISI	TAMBAH/ KURANG
Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja			
Belanja Pegawai	40,005,800,000	40,005,800,000	0
Belanja Barang	82,506,144,000	73,966,228,000	(8,539,916,000)
Belanja Modal	1,651,056,000	2,222,470,000	571,414,000
Jumlah Belanja	124,163,000,000	116,194,498,000	(7,968,502,000)

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Badan Litbang Perhubungan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	2017		
	PAGU AWAL	PAGU REVISI	TAMBAH/ KURANG
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan	45,298,345,000	45,298,345,000	0
Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	16,768,940,000	16,768,940,000	0
Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	18,366,131,000	18,366,131,000	0
Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	17,738,742,000	17,738,742,000	0
Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	25,990,842,000	18,022,340,000	(7,968,502,000)
Total Belanja	124,163,000,000	116,194,498,000	(7,968,502,000)

Revisi pagu kurang karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dilakukan penghematan/pemotongan anggaran, yaitu kegiatan Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (Penumpang) pada satker Pusat Litbang Transportasi Antarmoda.

Realisasi
Pendapatan
Rp.1.138.844.919

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.138.844.919,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Pendapatan lingkup Badan Litbang Perhubungan terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	127,300,000	-
Pendapatan dari Sewa Gedung Bangunan	-	15,770,097	-
Pendapatan luran dan Denda	-	39,896,114	-
Pendapatan dari Tuntutan Perbendaharaan	-	13,500,000	-
Pendapatan Lain-Lain	-	942,378,708	-
Jumlah	-	1,138,844,919	-

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 75,03 % dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan adanya pendapatan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pendapatan dari penyelesaian tuntutan perbendaharaan di tahun 2017, selain itu meningkatnya pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar 158,26 %, serta Pendapatan Lain-lain mengalami kenaikan sebesar 160,91% yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja barang yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	127,300,000	283,368,932	-55.08
Pendapatan dari Sewa Gedung Bangunan	15,770,097	6,106,173	158.26
Pendapatan dari luran dan Denda	39,896,114	-	0.00
Pendapatan dari Tuntutan Perbendaharaan	13,500,000	-	0.00
Pendapatan Lain-Lain	942,378,708	361,190,913	160.91
Jumlah	1,138,844,919	650,666,018	75.03

Rincian realisasi pendapatan per satuan kerja di Badan Litbang sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	%
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	155,001,827	126,993,473	22.05
Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan	7,400,716	32,551,303	-77.26
Puslitbang Transportasi Udara	121,927,082	57,806,204	110.92
Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	16,830,000	139,041,138	-87.90
Puslitbang Transportasi Antarmoda	837,685,294	294,273,900	184.66
Jumlah	1,138,844,919	650,666,018	75.03

Realisasi Belanja
Rp.97.137.904.761

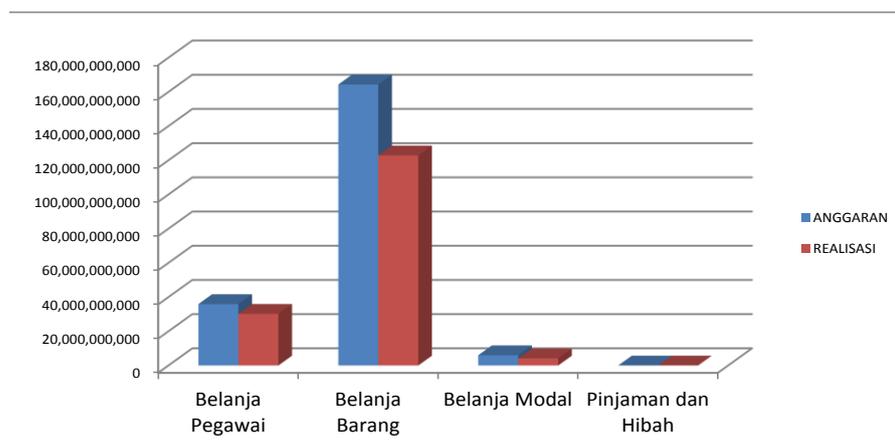
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 97.137.904.761 atau 83,60% dari anggaran belanja sebesar Rp. 116.194.498.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017

URAIAN	2017		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	40,005,800,000	26,634,413,923	66.576
Belanja Barang	73,966,228,000	69,136,206,525	93.47
Belanja Modal	2,222,470,000	2,158,308,555	97.113
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	116,194,498,000	97,928,929,003	84.28
Pengembalian Belanja		(791,024,242)	0
Total Belanja	116,194,498,000	97,137,904,761	83.599

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2017

KEGIATAN	2017		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan	45,298,345,000	36,026,581,205	79.53
Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	16,768,940,000	14,953,209,862	89.17
Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	18,366,131,000	15,700,075,221	85.48
Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	17,738,742,000	15,081,482,171	85.02
Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	18,022,340,000	16,167,580,544	89.71
Sub Total	116,194,498,000	97,928,929,003	84.28
		(791,024,242)	
Total Belanja	116,194,498,000	97,137,904,761	83.60

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar (38,00)% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan antara lain penurunan pagu anggaran, dan berkurangnya kegiatan penelitian dan kegiatan lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	26,329,963,097	29,884,925,571	(11.90)
Belanja Barang	68,649,633,109	122,616,074,138	(44.01)
Belanja Modal	2,158,308,555	4,171,937,468	(48.27)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	97,137,904,761	156,672,937,177	(38.00)

Belanja Pegawai
Rp. 26.329.963.097

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.329.963.097,- dan Rp. 29.884.925.571,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar (11,90)% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Adanya pengurangan pegawai karena memasuki masa purnabakti dan adanya pemindahan ke instansi lain.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	26,634,413,923	30,215,000,481	(11.85)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	26,634,413,923	30,215,000,481	(11.85)
Pengembalian Belanja Pegawai	(304,450,826)	(330,074,910)	(7.76)
Jumlah Belanja	26,329,963,097	29,884,925,571	(11.90)

Terdapat pengembalian belanja pegawai di tahun 2017 sebesar Rp. 304.450.826 yang berasal dari belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja gaji pokok PNS, belanja tunjangan struktural PNS, belanja fungsional PNS, belanja tunjangan umum PNS, dan belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan), rincian detail tersaji pada lampiran.

Rincian realisasi belanja pegawai per satuan kerja di Badan Litbang sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN T.A. 2017	REALISASI T.A. 2017	%
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	23,501,759,000	15,295,555,269	65.08
Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan	3,715,839,000	2,546,078,173	68.52
Puslitbang Transportasi Udara	4,878,702,000	2,885,836,043	59.15
Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	5,000,000,000	3,393,231,616	67.86
Puslitbang Transportasi Antarmoda	2,909,500,000	2,209,261,996	75.93
Jumlah	40,005,800,000	26,329,963,097	65.82

*Belanja Barang
Rp. 68.649.633.109*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 68.649.633.109,- dan Rp. 122.616.074.138,-.

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	7,089,438,456	6,917,707,405	2.48
Belanja Barang Non Operasional	12,181,139,066	61,051,257,578	(80.05)
Belanja Persediaan	2,621,304,465	1,390,358,884	88.53
Belanja Jasa	12,128,690,792	12,439,493,225	(2.50)
Belanja Pemeliharaan	1,854,166,870	2,287,735,282	(18.95)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	32,729,251,781	38,774,507,262	(15.59)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	532,215,095	-	-
Jumlah Belanja Kotor	69,136,206,525	122,861,059,636	(43.73)
Pengembalian Belanja	(486,573,416)	(244,985,498)	
Jumlah Belanja	68,649,633,109	122,616,074,138	(44.01)

Jika dilihat dari total realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar 44.01% dari TA 2016. Hal ini disebabkan berkurangnya kegiatan penelitian baik yang kontraktual maupun swakelola dan kegiatan lainnya, tetapi bila dilihat realisasi per akun maka terdapat penurunan yang signifikan meliputi :

1. Akun belanja barang non operasional sebesar (80,05)%, hal ini terjadi dikarenakan adanya revisi pagu anggaran di tahun 2017, anggaran semula di awal tahun 2017 sebesar Rp. 24.997.156.000 kemudian dilakukan revisi menjadi Rp. 6.580.599.000. Sehingga menyebabkan penurunan realisasi yang cukup signifikan di tahun 2017.
2. Akun belanja pemeliharaan sebesar (18,95)% hal ini karena pada tahun 2016 telah melakukan renovasi gedung kantor sehingga biaya pemeliharaan gedung dan bangunan pada tahun 2017 hanya yang rutin saja.

Rincian realisasi belanja barang per satuan kerja di Badan Litbang sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN T.A. 2017	REALISASI T.A. 2017	%
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	20,916,400,000	19,417,512,223	92.83
Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan	14,475,096,000	12,977,111,048	89.65
Puslitbang Transportasi Udara	12,720,040,000	11,993,530,327	94.29
Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	11,608,940,000	11,433,878,084	98.49
Puslitbang Transportasi Antarmoda	14,245,752,000	12,827,601,427	90.05
Jumlah	73,966,228,000	68,649,633,109	92.81

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.158.308.555,- dan Rp. 4.171.937.468,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,069,208,555	3,972,960,799	(47.92)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	89,100,000	198,976,669	(55.22)
Jumlah Belanja Kotor	2,158,308,555	4,171,937,468	(48.27)
Pengembalian	-	0	-
Jumlah Belanja	2,158,308,555	4,171,937,468	(48.27)

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami penurunan sebesar (48,27)% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan :

1. Berkurangnya pengadaan Aset BMN di tahun 2017.
2. Adanya penurunan Pagu Anggaran untuk Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar 62.95% dari Pagu Anggaran untuk Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 yang menyebabkan turunnya realisasi Belanja Modal di Tahun 2017.

Rincian realisasi belanja modal per satuan kerja di Badan Litbang sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN T.A. 2017	REALISASI T.A. 2017	%
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	880,186,000	875,875,000	99.51
Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan	175,196,000	171,691,000	98.00
Puslitbang Transportasi Udara	140,000,000	137,685,555	98.35
Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	160,000,000	126,100,000	78.81
Puslitbang Transportasi Antarmoda	867,088,000	846,957,000	97.68
Jumlah	2,222,470,000	2,158,308,555	97.11

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Badan Litbang Perhubungan sampai saat ini tidak memiliki asset tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan 2016.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.069.208.555,- mengalami penurunan sebesar (47,92)% bila dibandingkan dengan TA 2016 sebesar Rp. 3.972.960.799. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pagu anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,069,208,555	3,972,960,799	(47.92)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	2,069,208,555	3,972,960,799	(47.92)
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	2,069,208,555	3,972,960,799	(47.92)

Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin per satuan kerja di Badan Litbang sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN T.A. 2017	REALISASI T.A. 2017	%
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	880,186,000	875,875,000	99.51
Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan	175,196,000	171,691,000	98.00
Puslitbang Transportasi Udara	140,000,000	137,685,555	98.35
Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	70,000,000	37,000,000	52.86
Puslitbang Transportasi Antarmoda	867,088,000	846,957,000	97.68
Jumlah	2,132,470,000	2,069,208,555	97.03

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan sebesar Rp. 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A. 2016	(Dalam Rupiah)
			Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA
2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A. 2016	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 89.100.000,- dan Rp. 198.976.669,-. Realisasi TA 2017 mengalami penurunan sebesar (55,22)% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan tidak adanya pengadaan *software* tambahan di Badan Litbang Perhubungan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	0	0	0.00
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan	89,100,000	198,976,669	0.00
Jumlah Belanja Kotor	89,100,000	198,976,669	(55.22)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	89,100,000	198,976,669	(55.22)

Rincian realisasi belanja modal lainnya per satuan kerja di Badan Litbang sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN T.A. 2017	REALISASI T.A. 2017	%
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	-	-	0.00
Puslitbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan penyeberangan	-	-	0.00
Puslitbang Transportasi Udara	-	-	0.00
Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	90,000,000	89,100,000	99.00
Puslitbang Transportasi Antarmoda	-	-	0.00
Jumlah	90,000,000	89,100,000	99.00

Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A 2016	Naik (Turun)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0.00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0.00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2017 dan TA 2016*

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Rekening Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp.0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2017 dan TA 2016*

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang

siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2017 Dan TA 2016*

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNB
Rp.0*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNB TA 2017 dan 2016

Uraian	TH 2017	TH 2016
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp. 0*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2017 dan 2016*

No	Nama	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	13,500,000	-
Jumlah		13,500,000	-

Bagian Lancar TPA
Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
TA 2017*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp. 0

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 2017 dan 2016*

JENIS	TH 2017	TH 2016
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2017 dan 2016*

JENIS	TH 2017	TH 2016
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp. 34.459.540

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 34.459.540,- dan Rp. 2.346.984.560,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016

JENIS	TH 2017	TH 2016	Mutasi
Barang Konsumsi	34,312,540	39,560,210	(5,247,670)
Barang untuk Pemeliharaan	-	-	-
Suku Cadang	-	-	-
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	2,307,424,350	(2,307,424,350)
Persediaan Lainnya	147,000	-	-
Jumlah	34,459,540	2,346,984,560	(2,312,672,020)

Rincian Persediaan berupa Alat Tulis Kantor di Badan Litbang Perhubungan sebagai berikut :

JENIS	JUMLAH	NILAI
BARANG KONSUMSI		
Alat Tulis		1,364,330
Penjepit Kertas		313,500
Penghapus/Korektor		33,000
Buku Tulis		77,000
Ordner dan Map		10,106,250
Penggaris		66,000
Alat Tulis Kantor Lainnya		3,739,560
Kertas HVS		2,651,900
Berbagai Kertas		105,500
Amplop		112,200
Kertas dan Cover Lainnya		33,000
Tinta Cetak		1,815,000
Tinta/Toner Printer		12,529,000
USB/Flash Disk		1,249,300
Batu Baterai		264,000
Jumlah Barang Konsumsi		34,459,540

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp. 0.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp. 0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Non Lancar
Rp. 0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang tak Tertagih-Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Non Lancar TA 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp. 0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Litbang Perhubungan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	-

Peralatan dan

Mesin

Rp.49.493.936.006

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.493.936.006,- dan Rp. 55.191.502.116,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	55,191,502,116
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	2,069,208,555
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(7,766,774,665)
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	49,493,936,006
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	(32,821,519,263)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	16,672,416,743

Mutasi tambah berupa:

Penambahan peralatan dan mesin dari pembelian berupa:

No	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Nilai
1	Kendaraan dinas bermotor perorangan	2	1,088,980,000
2	Kendaraan dinas bermotor penumpang	1	149,150,000
3	Kendaraan dinas bermotor roda dua	2	47,100,000
4	Mesin Hitung / Mesin Jumlah	1	13,200,000
5	Alat penyimpan perlengkapan kantor	1	28,050,000
6	Alat Kantor Lainnya	3	49,450,000
7	Meubelair	1	19,800,000
8	Alat Pendingin	5	36,410,129
9	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	49,084,000
10	Peralatan Studio Audio	4	45,650,000
11	Peralatan Studio Video dan Film	1	1,479,170
12	Alat Komunikasi Telephone	6	15,000,000
13	Alat Komunikasi Radio VHF	3	18,000,000
14	Modular Counting and Scientific Electronic	2	17,820,000
15	Personal Komputer	29	412,173,256
16	Peralatan Mainframe	1	22,550,000
17	Peralatan Personal Komputer	7	33,994,000
18	Peralatan Fasilitas Pelayanan dan Pengamanan	2	21,318,000
Jumlah			2,069,208,555

Mutasi kurang sejumlah Rp. 7.766.774.665,- karena kondisi rusak berat dan dihentikan dari operasional pemerintah serta sudah diusulkan penghapusan kepada pengelola barang (SK Pengusulan Penghapusan terlampir).

*Gedung dan
Bangunan Rp. 0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Koreksi pencatatan	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2017	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp. 519.230.700

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 519.230.700,- dan Rp. 519.230.700,-. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan listrik.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	519,230,700
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Informasi Teknologi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2017	519,230,700
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(73,415,189)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	445,815,511

Aset Tetap Lainnya
Rp. 3.425.482.147

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 3.425.482.147,- dan Rp. 3.336.382.147,-.

Saldo per 31 Desember 2016	3,336,382,147
Mutasi tambah:	
Penambahan Aset Tetap Lainnya	89,100,000
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2017	3,425,482,147
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	3,425,482,147

Mutasi tambah:

- Aset Tetap Lainnya pada tahun 2017 keseluruhannya berasal dari pengadaan berupa buku koleksi perpustakaan Badan Litbang Perhubungan senilai Rp. 89.100.000.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp. 0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(32.894.934.452)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp. (32.894.934.452),- dan Rp. (33.154.465.558),-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	49,493,936,006	(32,821,519,263)	16,672,416,743
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	519,230,700	(73,415,189)	445,815,511
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	50,013,166,706	(32,894,934,452)	17,118,232,254

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

Aset Tak Berwujud
Rp. 145.793.747.585

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 145.793.747.585,- dan Rp. 138.410.354.815,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	138,410,354,815
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	17,210,137,250
Transfer Masuk	Rp	-
Mutasi Kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(9,826,744,480)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	145,793,747,585
Amortisasi	Rp	(5,334,493,769)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	140,459,253,816

Aset Tak Berwujud TA 2017 berupa

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 5,046,605,405
2	Lisensi	Rp 1,345,160,000
3	Hasil Kajian/Penelitian	Rp 139,401,982,180
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2017		Rp 145,793,747,585

Rincian Aset Tak Berwujud tersaji pada lampiran.

Aset Lain-Lain

Rp.323.895.312.333

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 323.895.312.333,- dan Rp. 306.301.793.188,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Litbang Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	306,301,793,188
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	17,593,519,145
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2017	323,895,312,333
Akumulasi Penyusutan	(135,685,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	323,759,627,333

Aset Lain lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya meliputi :

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	35,984,000
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17,490,000
3	Alat Bengkel Tak Bermesin	1,083,500
4	Alat Pengolahan	26,785,000
5	Alat Kantor	1,383,863,480
6	Alat Rumah Tangga	2,238,549,235
7	Alat Studio	142,371,800
8	Alat Komunikasi	31,145,800
9	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	27,494,500
10	Alat Khusus Kepolisian	1,155,000
11	Komputer Unit	3,083,513,700
12	Peralatan Komputer	690,607,400
13	Alat Pelindung	6,289,250
14	Peralatan Olahraga	99,990,000
15	Aset Tak Berwujud	316,108,989,668
Jumlah		323,895,312,333

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Tak Berwujud
Rp.(5.334.493.769)*

C.23.1 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. (5.334.493.769),- dan Rp. (4.145.905.686),-. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset takberwujud adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	Rp 5,046,605,405	Rp (4,704,416,269)	Rp 342,189,136
2	Lisensi	Rp 1,345,160,000	Rp (630,077,500)	Rp 715,082,500
3	Hasil Kajian/Penelitian	Rp 139,401,982,180	Rp -	Rp 139,401,982,180
Jumlah		Rp 145,793,747,585	Rp (5,334,493,769)	Rp 140,459,253,816

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lain Lain
Rp.(7.762.051.961)*

C.23.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. (7.762.051.961),- dan Rp. (132.683.000),-. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lain lain adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tetap	Rp 250,228,147,763	Rp (7,608,766,961)	Rp 242,619,380,802
2	Aset Tak Berwujud	Rp 73,667,164,570	Rp (153,285,000)	Rp 73,513,879,570
Total		323,895,312,333	(7,762,051,961)	316,133,260,372

Utang Muka dari
KPPN Rp. 0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.62.331.737

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 62.331.737,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang pihak ketiga terdiri dari Beban Uang Makan PNS dan Beban Gaji Pokok PNS yang masih harus dibayar. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Tahun 2017
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	24,783,132
Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	13,093,758
Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan	12,680,000
Pusat Litbang Transportasi Udara	5,415,847
Pusat Litbang Transportasi Antar Moda	6,359,000
Jumlah	62,331,737

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp. 0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas

Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

Beban yang Masih harus Dibayar Rp. 0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2017 dan TA 2016

Keterangan	TH 2017	TH 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp.477.108.356.392

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 477.108.356.392,- dan Rp. 468.673.193.282,- Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp. 55.666.211

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 55.666.211,- dan Rp. 6.106.173,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNB Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	15,770,097	6,106,173	158.26
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	39,896,114	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	55,666,211	6,106,173	811.64

Pendapatan Jasa berasal dari sewa ruang foto copy dan sewa ruang kantin.

Beban Pegawai
Rp. 26.392.294.834

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.392.294.834,- dan Rp. 29.875.796.890,-.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	26,392,294,834	29,165,414,890	(9.51)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	710,382,000	(100.00)
Jumlah	26,392,294,834	29,875,796,890	(11.66)

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp. 2.622.839.840

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.622.839.840,- dan Rp. 1.404.391.357,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
TA 2017 dan TA 2016*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2,622,839,840	1,404,391,357	86.76
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	2,622,839,840	1,404,391,357	86.76

Beban Barang
dan Jasa
Rp.31.114.564.314

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.114.564.314,- dan Rp. 77.953.065.958,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2017 dan TA 2016*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Beban Barang Oreasional	7,089,138,456	6,851,266,505	3.47
Beban Barang Non Operasional	12,181,139,066	58,726,800,728	(79.26)
Beban Langganan Daya dan Jasa	3,717,604,192	3,427,898,225	8.45
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Profesi	7,943,817,000	8,788,170,500	(9.61)
Beban Jasa Lainnya	182,865,600	158,930,000	15.06
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	31,114,564,314	77,953,065,958	(60.09)

Beban
Pemeliharaan
Rp. 1.854.166.870

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.854.166.870,- dan Rp. 2.120.009.782. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagaiberikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2017 dan TA 2016*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	362,967,130	456,576,755	(20.50)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,491,199,740	1,663,433,027	(10.35)
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	1,854,166,870	2,120,009,782	(12.54)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.33.059.597.460

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 33.059.597.460,- dan Rp. 38.676.038.764. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2017 dan TA 2016*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	30,463,553,253	34,828,668,163	(12.53)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	197,565,500	416,040,000	(52.51)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	769,236,818	1,089,485,410	(29.39)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,097,078,500	1,555,365,650	(29.46)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	532,163,389	786,479,541	(32.34)
Jumlah	33,059,597,460	38,676,038,764	(14.52)

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp. 2.307.424.350*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.307.424.350 ,- dan Rp. 0,-.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Badan Litbang Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman instansi di daerah dan masyarakat mengenai tatanan transportasi yang handal. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa Studi Sistranas pada Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) di wilayah Kabupaten Lombok Timur, Studi Sistranas pada Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) di wilayah Kabupaten Malaka, dan Studi Penyusunan Rencana Induk Terminal Wilayah Sumatera (Terminal Tipe A Padang dan Terminal Tipe A Bandar Lampung), dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2,307,424,350	0	0.00
Jumlah	2,307,424,350	0	0.00

Rincian Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat TA 2017

NO	JENIS	NILAI
1	Studi Sistranas pada Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) di wilayah Kabupaten Lombok Timur	558,290,700
2	Studi Sistranas pada Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) di wilayah Kabupaten Malaka	553,598,650
3	Studi Penyusunan Rencana Induk Terminal Wilayah Sumatera (Terminal Tipe A Padang dan Terminal Tipe A Bandar Lampung)	1,195,535,000
	T O T A L	2,307,424,350

Rincian Berita Acara Serah Terima (BAST) barang ada pada lampiran.

Beban Bantuan
Sosial Rp. 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2017 dan TA 2016*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.8.558.425.938

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.558.425.938,- dan Rp. 9.561.378.360,-.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2017 dan TA 2016*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,193,245,307	8,129,310,819	(11.51)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,922,572	12,951,670	(0.22)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	7,206,167,879	8,142,262,489	(11.50)
Beban Amortisasi Aplikasi	1,071,672,083	1,261,651,371	-
Beban Amortisasi Lisensi	134,516,000	134,516,000	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	22,550,000	22,550,000	-
Jumlah Amortisasi	1,228,738,083	1,418,717,371	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	123,519,976	398,500	30,896.23
Jumlah	8,558,425,938	9,561,378,360	(10.49)

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp. 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2017 dan TA 2016*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.1.079.613.413

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
TA 2017 dan TA 2016*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	127,300,000	283,368,932	100.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0.00
Defisit Selisih Kurs	0	0	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	962,897,733	368,101,643	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(10,584,320)	(8,765,297)	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1,079,613,413	642,705,278	67.98

**) Pendapatan/Beban dari kegiatan non operasional lainnya merupakan Penyesuaian Nilai Persediaan yang timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017*

*Pos-Pos Luar Biasa
Rp. 0*

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Pendapatan PNB	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0.00
Defisit Pos Luar Biasa	0	0	0.00

*Surplus/ (Defisit)
Laporan*

Operasional

Rp.(104.774.033.982)

D.13 Surplus/(Defisit) LO

Surplus / (defisit) LO merupakan pendapatan atau beban yang terdapat pada entitas. Rincian Surplus / (defisit) LO per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar minus Rp. (104.774.033.982),- dan Rp. (158.941.869.660),-.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.468.673.193.282

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 468.673.193.282,- dan Rp. 474.114.339.665.

Ekuitas awal per satker dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Tahun 2017
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	208,143,052,659
Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	96,556,137,563
Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan	74,287,694,400
Pusat Litbang Transportasi Udara	36,253,524,143
Pusat Litbang Transportasi Antar Moda	53,432,784,517
Jumlah	468,673,193,282

Defisit LO
Rp.(104.774.033.982)

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah defisit sebesar Rp. (104.774.033.982),- dan Rp. (158.941.869.660),-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp. 0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp. 0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. 0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp. 0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.17.210.137.250

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 17.210.137.250,- dan Rp. (2.521.547.882),-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2017

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Aset Tetap Berwujud	17,210,137,250
Jumlah	17,210,137,250

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi berupa transaksi aset hasil kajian/penelitian pada satker Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda.

Koreksi Lain-lain

Rp. 0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar

Entitas

Rp.95.999.059.842

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 95.999.059.842,- dan Rp. 156.022.271.159,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1,138,844,919)
Ditagihkan ke Entitas Lain	97,137,904,761
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	95,999,059,842

Nilai Transaksi Antar Entitas per satker dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja	Tahun 2017
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	35,433,940,665
Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	14,936,379,700
Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan	15,687,479,505
Pusat Litbang Transportasi Udara	14,539,055,603
Pusat Litbang Transportasi Antar Moda	15,402,204,369
Jumlah	95,999,059,842

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp. (1.138.844.919),- sedangkan DKEL sebesar Rp. 97.137.904.761,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor	-
2	Aset Tak Berwujud	Kementerian	-
3	Persediaan	Deputi Akuntansi	-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- yang merupakan transfer Persediaan kepada Kantor.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai

dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta	Uang	Rp -
2	Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta	Uang	Rp -
		Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp.477.108.356.392

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 477.108.356.392,- dan Rp. 468.673.193.282,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 REKENING PEMERINTAH

Daftar rekening pemerintah di lingkungan Badan Litbang Perhubungan terdapat 5 (lima) satuan kerja dengan jumlah rekening masing-masing telah mendapat persetujuan dari KPPN Jakarta IV atas nama masing-masing bendahara pengeluaran di satuan kerja terkait.

No	Kantor/Satuan Kerja	Nomor Rekening	Bank
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat Badan Litbang Phb	0018285431	BNI 1946
2	Puslitbang Phb Darat/ Perkeretaapian	0018315467	BNI 1946
3	Puslitbang Phb Laut	0018285464	BNI 1946
4	Puslitbang Phb Udara	0018292200	BNI 1946
5	Puslitbang Manajemen Transportasi Multimoda	119-00-0202323-0	Bank Mandiri

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Telah diusulkan penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud (HasilKajian/Penelitian) yang telah habis masa manfaat, dengan surat usulan nomor: PL.201/1/1-BLT-2016 tanggal 15 April 2016, dan proses usulan telah diteruskan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, surat nomor PL.402/2/12-PHB-2016 tanggal 29 April 2016 perihal usulan penetapan status penggunaan dan rekomendasi penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, total asset sebanyak 395 buku dengan nilai perolehan sebesar Rp. 306.282.245.188,- dan perkiraan harga limit Rp. 0,- dengan rincian sbb:

No	Satker	Jumlah penelitian	Nilai Perolehan
1	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	170 buku	Rp 165.282.245.188,-
2	Puslitbang Phb Darat	78 buku	Rp 40.327.925.339,-
3	Puslitbang Phb Laut	58 buku	Rp 36.378.083.050,-
4	Puslitbang Phb Udara	39 buku	Rp 29.451.436.385,-
5	Puslitbang Phb MTM	50 buku	Rp 34.388.983.705,-
	Total	395 buku	Rp 306.282.245.188,-

2. Pada Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian terdapat reklasifikasi dari asset tetap peralatan dan mesin ke asset lain lain berupa kendaraan roda 2 karena hilang dan sampai saat ini masih dalam proses usulan penghapusan, nilai asset sebesar Rp. 21.021.000,-.
3. Pada Pusat Litbang Transportasi Antarmoda telah dilakukan lelang penjualan asset BMN yang akan dihapus berupa kendaraan bermotor dinas sebanyak 1 unit dengan nilai jual Rp. 41.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Jual
1	Station Wagon	1 unit	160.000.000	41.100.000
	Jumlah		160.000.000	41.100.000

Aset BMN tersebut masih dalam proses usulan permohonan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN.

4. Pada Sekretariat Badan Litbang Perhubungan telah dilakukan lelang penjualan asset BMN yang akan dihapus berupa kendaraan bermotor dinas sebanyak 3 unit dengan nilai jual Rp. 86.200.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Nilai Perolehan	Nilai Jual
1	Alat Angkut Darat Bermotor (Sedan)	1 Unit	Rp 170,721,000	Rp -
2	Alat Angkut Darat Bermotor (Mini Bus)	1 Unit	Rp 124,900,000	Rp -
3	Alat Angkut Darat Bermotor (Mini Bus)	1 Unit	Rp 150,000,000	Rp -
	Jumlah	3 Unit	Rp 445,621,000	Rp -

Aset BMN tersebut masih dalam proses usulan permohonan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN

5. Berdasarkan audited Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat hasil pekerjaan studi/penelitian yang telah diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2017 telah diserahterimakan, dan telah tercatat pada Persediaan.

Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Pemda berupa :

NO	JENIS	NILAI
A.	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	1,111,889,350
1	Studi Sistranas pada Tataan Transportasi Lokal (Tatralok) di wilayah Kabupaten Lombok Timur	558,290,700
2	Studi Sistranas pada Tataan Transportasi Lokal (Tatralok) di wilayah Kabupaten Malaka	553,598,650
B.	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	1,195,535,000
1	Studi Penyusunan Rencana Induk Terminal Wilayah Sumatera (Terminal Tipe A Padang dan Terminal Tipe A Bandar Lampung)	1,195,535,000
	T O T A L	2,307,424,350

6. Pada tahun anggaran 2017 di Badan Litbang Perhubungan Pejabat Pengelola Keuangan meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

Satker / Jabatan	Nama
Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	
Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. Juanda Siahaan, M.Si.
Pejabat Pembuat Komitmen	Ifan Puspawijaya
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Santi Yuniarti,
Bendahara	Nelly Siringoringo, SE
Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	
Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. Danto Restyawan, MT
Pejabat Pembuat Komitmen	Yok Suprobo, S.T.
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Dwi Widiyanti, S.E., M.MTr
Bendahara	Siti Rofiah, S.T.
Pusat Litbang Transportasi Laut, Danau, Sungai dan Penyeberangan	
Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. Ahmad, M.MTr., QIA., CFr.A.
Pejabat Pembuat Komitmen	Dra. Tri Kusumaning Utami, MMTr
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Wahyu Prasetya Anggrahini
Bendahara	Harry Susanto
Pusat Litbang Transportasi Udara	
Kuasa Pengguna Anggaran	Moh. Alwi
Pejabat Pembuat Komitmen	Ali Murtadho, S.T.
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Zulaichah
Bendahara	Sri Wahyuningsih
Pusat Litbang Transportasi Antarmoda	
Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. Imran Rasyid, MBA
Pejabat Pembuat Komitmen	Agung Wicaksono, SH
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Reslyana Dwitarsari, S.Kom., M.T.
Bendahara	Didok Sencoko

Jakarta, April 2018

KEPALA BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc
NIP. 19610323 198811 2 001